



Pendidikan Berbasis Nilai untuk Penguatan Integritas dan Antikorupsi Siswa

Agung Nugraha Putra¹, Rahmat Rahmat², Susan Fitriasari³, Iim Siti Masyitoh⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

*agungnugrahap@upi.edu

Article Info

Article history:

Received: 5th December 2024

Revised: 15th March 2025

Accepted: 27th April 2025

Keywords:

Integrity, Anticorruption, Value-Based Education

ABSTRACT

Corruption remains a persistent problem undermining Indonesia's development at both local and national levels. Addressing this issue requires a holistic strategy, one of which involves integrating values of integrity and anti-corruption into educational practices. Value-Based Education offers an effective preventive approach by providing students with a moral foundation through the internalization of ethical values within contextual and interactive learning experiences. This article employs a literature review method, identifying and analyzing previous research related to integrity, anti-corruption, and value-based education models. The findings highlight nine essential integrity and anti-corruption values: (1) honesty, (2) responsibility, (3) discipline, (4) independence, (5) hard work, (6) simplicity, (7) courage, (8) care, and (9) justice. These values are crucial in guiding students to consistently uphold ethical principles in their daily lives, fostering a culture of integrity and contributing to the creation of a corruption-free society. However, this study is limited by its conceptual nature, as it relies solely on literature review without empirical validation in educational settings. Future research is recommended to conduct experimental or classroom-based studies to assess the practical effectiveness of value-based education models in promoting anti-corruption behavior among students across different educational levels.

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.
©2025 by the author(s).*



Corresponding Author:

Agung Nugraha Putra

Prodi PPKn, Universitas Pendidikan Indonesia

agungnugrahap@upi.edu

PENDAHULUAN

Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Di Indonesia, praktik korupsi seolah telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari sistem, dan hingga kini belum ada strategi yang benar-benar efektif untuk memberantasnya. Secara sederhana, korupsi dapat dipahami sebagai tindakan melawan hukum demi keuntungan pribadi (Suradi, 2006). Bentuk-bentuk korupsi pun beragam, mulai dari penyuapan, konflik kepentingan, pemerasan dalam bidang ekonomi, hingga pemberian hadiah atau fasilitas secara ilegal. Fenomena ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Perilaku korup dapat ditemukan dalam berbagai praktik kehidupan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Otonomi dan desentralisasi menjadi menyebabkan korupsi menyebar ke daerah (Sanusi, 2009). Korupsi umumnya berkaitan erat dengan penyalahgunaan kekuasaan atau keuangan yang tidak semestinya. Walaupun ada jenis korupsi lain, seperti korupsi waktu yang dilakukan oleh pejabat negara. Namun, korupsi yang menimbulkan dampak besar bagi masyarakat adalah korupsi uang. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tindakan korupsi masih jauh dari kata optimal. Salah satu penyebabnya adalah kompleksitas dan sifat multidimensi dari permasalahan korupsi itu sendiri. Pendekatan parsial dirasa tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh.

Pendidikan memegang peranan sentral dan pilar utama dalam membentuk karakter dan kepribadian individu, khususnya di tingkat pendidikan menengah. Hal ini dilihat sebagai masa krusial bagi perkembangan moral dan intelektual siswa. Di tengah derasnya arus globalisasi dan kompleksitas tantangan di era modern, pendidikan tidak hanya bertujuan membangun kecakapan akademik, melainkan menanamkan nilai-nilai luhur seperti integritas, kejujuran serta tanggung jawab. Nilai tersebut tentunya menjadi landasan utama untuk melawan praktik korupsi yang semakin marak di berbagai lini kehidupan.

Korupsi saat ini berada pada tahap kritis sehingga memerlukan perhatian serius dan langkah strategis untuk penanganannya. Solusi yang diterapkan harus komprehensif, melibatkan berbagai pihak, serta fokus pada aspek pencegahan dan pemberantasan. Mengintegrasikan nilai integritas dan antikorupsi ke dalam kurikulum, terutama mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), merupakan salah satu cara efektif. Pendidik perlu mengembangkan model pembelajaran yang relevan, inovatif, dan interaktif dengan penekanan pada penanaman nilai. Model Pendidikan Berbasis Nilai (*Value-Based Education, VBE*) dapat menjadi alternatif untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan sebagai upaya preventif terhadap perilaku korupsi. Pendidikan ini memberikan landasan moral bagi siswa melalui penanaman nilai dalam aktivitas pembelajaran yang kontekstual.

VBE menempatkan nilai-nilai kebajikan dan kehidupan sebagai inti dari proses pendidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan penekanan pada aspek moral dan etika yang terkandung dalam materi pembelajaran (Fakhruddin, 2018). Pembelajaran berbasis nilai diharapkan tidak sekadar mengajarkan pengetahuan kognitif saja, melainkan menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang mampu memperkuat moral dan menumbuhkan karakter tertentu pada siswa. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis mengenai urgensi dan kebutuhan VBE guna membentuk karakter integritas dan antikorupsi pada siswa sekolah menengah.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review*, yaitu pendekatan berbasis kajian literatur yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi dan menganalisis berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami konsep, teori dan temuan empiris sebelumnya terkait VBE, sehingga memberikan landasan yang kuat untuk membangun kerangka konseptual yang lebih jelas dan terarah. Fokus kajian artikel ini adalah teori dan model pembelajaran VBE, yang telah dipublikasikan baik pada jurnal nasional maupun internasional. Teknik analisis data dalam penulisan artikel ini menggunakan teknik dari (Miles & Huberman, 1992) yang menggunakan beberapa tahapan, yaitu: reduksi data, display data, verifikasi data serta penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah karakter kerap dimaknai sebagai konsep yang berkaitan dengan etika, moralitas, dan nilai-nilai luhur yang merefleksikan kekuatan moral individu. Secara umum, karakter memiliki konotasi positif karena menggambarkan kualitas-kualitas yang baik dan patut diteladani. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010), karakter bukan hanya menjadi cerminan moralitas, tetapi juga identitas personal yang tampak melalui sikap dan kepribadian seseorang. Definisi serupa dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2024), yang menyebut karakter sebagai sifat-sifat terpuji yang melekat dalam diri seseorang dan tercermin dalam perilakunya. Dalam konteks lain, karakter dipahami sebagai seperangkat sifat yang membedakan individu satu dengan lainnya melalui tindakan, ucapan, serta cara mengambil keputusan sehari-hari (Murdiono, 2016).

Salah satu elemen penting dalam pembentukan karakter adalah integritas. Lickona (2022) menjelaskan bahwa integritas merupakan komitmen individu untuk berpegang pada prinsip-prinsip moral dan menjaga konsistensi antara keyakinan, ucapan, dan tindakan dalam berbagai situasi. Individu yang memiliki integritas akan menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai yang diyakini dengan perilaku nyata, tanpa adanya pertentangan atau ketidaksesuaian di dalamnya. Dengan demikian, integritas menjadi landasan utama dalam membangun karakter yang kuat dan bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan berbasis nilai bertujuan membentuk peserta didik agar mampu menghadapi kehidupan sosial dengan sikap, nilai, dan perilaku yang sesuai (Gurukul, 2024). Proses ini mencakup pengembangan kepribadian secara utuh, meliputi karakter, kewarganegaraan, serta dimensi spiritual. Lickona (1992) membagi karakter ke dalam tiga komponen utama, yaitu pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*). Pengetahuan moral berkaitan dengan kemampuan membedakan antara benar dan salah serta pemahaman terhadap nilai-nilai moral. Perasaan moral menyangkut respons emosional yang muncul saat individu dihadapkan pada situasi dilematik, sedangkan tindakan moral merupakan aktualisasi nilai dalam perilaku nyata sehari-hari. Dengan demikian, karakter yang baik tercermin dari kemampuan mengetahui, menginginkan, dan melakukan hal yang baik secara konsisten.

Pendidikan karakter merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk membimbing agar anak-anak mampu membuat keputusannya sendiri serta mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari (Kobandaha, 2019). Proses pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada pembentukan kognitif atau intelektual semata, melainkan pada penguatan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan utama dalam bersikap dan bertindak. Tujuan utama dari pendidikan karakter adalah menumbuhkan generasi yang dapat memberikan sumbangsih nyata berupa nilai positif pada lingkungannya. Untuk mewujudkan nilai positif ini, maka anak-anak harus dididik untuk memiliki sifat dasar yang mencerminkan karakter yang baik, seperti tanggung jawab, empati, kejujuran dan integritas.

Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan 18 nilai pendidikan karakter sebagai panduan untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berkepribadian unggul (Antari & Liska, 2020) Nilai-nilai tersebut meliputi: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Namun, pada tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merumuskan ulang lima nilai karakter prioritas dalam Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang terdiri dari: religius, nasionalis, integritas, mandiri dan gotong royong.

Salah satu nilai penting dalam lima karakter prioritas PPK adalah Integritas. Integritas merupakan fondasi bagi setiap individu untuk selalu dapat dipercaya dalam perkataan maupun tindakan (Tuhuteru, 2023). Nilai Integritas mencerminkan komitmen dan kesetiaan terhadap berbagai prinsip moral dan kemanusiaan. Pada tataran negara, integritas bisa mendorong aparaturnya pemerintahan untuk bekerja dengan profesional, jujur, transparan dan dapat dipercaya.

Namun, faktanya di Indonesia banyak permasalahan yang menyangkut integritas ini, salah satunya adalah korupsi. Korupsi kerap kali bermula dari tindakan kecil yang dianggap sepele, sebelum akhirnya berkembang menjadi pelanggaran dalam skala yang lebih besar. Beberapa bentuk tindak pidana korupsi meliputi penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, pemerasan, konflik kepentingan, hingga gratifikasi dengan memberikan hadiah dengan tujuan dan maksud tertentu.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, pada BAB II pasal 2 menyebutkan pengertian korupsi adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Setiap individu memiliki potensi untuk melakukan tindakan korupsi, tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Tindakan korupsi biasanya dilakukan secara terencana, sistematis dan menunjukkan bahwa perilaku ini tidak terjadi secara kebetulan.

Pemberantasan korupsi merupakan suatu proses yang membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak sekadar upaya hukum tetapi melalui penanaman pemikiran dan nilai-nilai antikorupsi melalui lembaga pendidikan formal (Komalasari & Saripudin, 2015). Hal tersebut, mendasari perlunya pendidikan antikorupsi sebagai suatu upaya yang dirancang secara sistematis untuk menciptakan proses pembelajaran yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai antikorupsi secara mendalam (Kristiono, 2018).

Dalam praktiknya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tentang bahaya serta bentuk korupsi, melainkan pembentukan karakter melalui aspek afektif. Pendekatan afektif ini bertujuan untuk membangun kesadaran emosional dan moral siswa terhadap pentingnya melawan segala bentuk korupsi. Berikut ini merupakan nilai-nilai antikorupsi beserta indikator yang dikutip melalui (Shobirin, 2014) dan (Fauziyah, 2015).

Tabel 1. Nilai-nilai Antikorupsi Beserta Indikator

No.	Nilai	Indikator
1.	Kejujuran	Senantiasa berkata dan berperilaku sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak berbuat curang, tidak mengakui milik orang sebagai miliknya, serta berani mengakui kesalahan (Shobirin, 2014).
2.	Kepedulian	Senantiasa memperhatikan diri, orang lain, adanya perasaan iba atau simpati, serta menjaga lingkungannya agar tetap pada kondisi yang seharusnya (Shobirin, 2014).
3.	Kemandirian	Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan orang lain serta memiliki kepercayaan diri untuk mengambil keputusan sendiri dan mampu menghadapi masalah (Shobirin, 2014).
4.	Kedisiplinan	Selalu patuh dan tertib serta berpegang teguh pada aturan yang ada (Fauziyah, 2015).
5.	Tanggung jawab	Perilaku yang senantiasa melaksanakan amanah yang diemban serta menuntaskan pekerjaan atau tugas-tugas dengan hasil terbaik (Fauziyah, 2015).
6.	Kerja Keras	Perilaku yang selalu melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh sungguh dan menghindari perbuatan instan atau jalan pintas (Shobirin, 2014).

7.	Kesederhanaan	Tidak berlebihan atau bermewah-mewahan, tidak sombong, senantiasa berpenampilan apa adanya, dan hidup sesuai kebutuhan (Shobirin, 2014).
8.	Keberanian	Tingkah laku yang senantiasa berani menegakkan kebenaran walaupun seorang diri (Fauziyah, 2015).
9.	Keadilan	Selalu menghargai perbedaan, tidak berat sebelah, dan tidak memihak (Shobirin, 2014).

Pentingnya mengembangkan karakter integritas dan antikorupsi terletak pada penekanan aspek moralitas, kejujuran, tanggung jawab, dan semangat untuk membentuk pribadi yang bersih dan bebas dari kepentingan sektoral. Pendidikan antikorupsi bertujuan membimbing setiap individu agar selalu berkata benar dan melangkahakan gerak kakinya kepada jalan kebenaran (Yamin, 2016). Oleh karena itu pendidikan antikorupsi dapat dianggap sebagai aspek mendasar dalam membangun mental dan karakter yang kokoh berpegang kepada nilai-nilai kebenaran.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran di pendidikan formal yang dapat disisipkan dengan nilai integritas dan antikorupsi. Penanaman nilai tersebut dapat dilakukan dengan model pembelajaran berbasis nilai (*value-based education*). Gurukul (2024) berpendapat bahwa nilai adalah penting dalam mengembangkan dan membentuk pribadi seseorang dan membawa banyak perubahan pada sikap, persepsi serta perilaku seseorang. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Hawkes (2022) yang melihat bahwa pendidikan berbasis nilai mengupayakan lembaga sekolah untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang positif dan universal seperti rasa hormat, integritas, kejujuran dan kasih sayang.

Pendidikan berbasis nilai hanya dapat diwujudkan oleh suatu lembaga pendidikan yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang sehat, mendukung, serta menyenangkan bagi peserta didik. Beberapa langkah praktis untuk mewujudkan pendidikan berbasis nilai antara lain dengan menanamkan nilai-nilai sejak dini, membangun komitmen yang kokoh dari seluruh elemen civitas akademika, serta memastikan seluruh guru memiliki kecakapan dan dedikasi tinggi untuk menciptakan suasana belajar yang mampu menanamkan nilai-nilai tersebut kepada siswa (Nurjunaedah, 2014).

Pendidikan berbasis nilai berangkat pada teori pembelajaran afektif model (Krathwohl, 1956) yang menyoroti kerangka kerja untuk memahami aspek-aspek pembelajaran yang berkaitan sikap, nilai dan perasaan siswa. Krathwohl menjelaskan terdapat lima tingkatan taksonomi mulai dari yang terendah hingga tertinggi, yakni: *receiving*, yaitu kemampuan menerima stimulus atau informasi yang relevan; *responding*, berupa keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran melalui tanggapan atau tindakan terhadap stimulus tersebut; *valuing*, yakni penghargaan terhadap nilai-nilai tertentu yang mulai diinternalisasikan; *organization*, fase di mana individu mengintegrasikan nilai-nilai yang diterima ke dalam sistemnya melalui pengorganisasian prioritas dan hubungan antar-nilai; serta *characterization*, yang mencerminkan penghayatan nilai secara konsisten dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran berbasis nilai memungkinkan siswa untuk melakukan refleksi mendalam terhadap diri sendiri, menggali, memahami serta mengklarifikasi nilai-nilai yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pendekatan ini erat kaitannya dengan penyampaian nilai-nilai melalui berbagai media, seperti lagu-lagu bermuatan kebangsaan, video inspiratif, hingga biografi tokoh perjuangan bangsa yang menjadi teladan. Model pembelajaran berbasis nilai, dinilai sangat relevan untuk menguatkan *civic disposition*, yaitu kemampuan serta kecenderungan warga negara untuk bersikap yang nantinya akan dijawantahkan dalam bentuk tindakan dan partisipasi warga negara

Model pembelajaran berbasis nilai, dapat diimplementasikan melalui metode pembelajaran *Value Clarification Technique* (VCT). Pendekatan ini menitikberatkan pada pengembangan nilai-nilai atau karakter yang ada di dalam diri siswa dengan membantu mereka mengklarifikasi dan memahami nilai tersebut dalam proses pembelajaran. Lebih lanjut, model ini melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan seperti menentukan pilihan benar atau salah, baik atau buruk. Proses ini bertujuan untuk membantu siswa menyadari, mengevaluasi serta meneguhkan nilai-nilai yang mereka yakini, sehingga dapat diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh pernyataan (Komalasari, 2017) bahwa VCT adalah salah satu pendidikan moral pembelajaran berbuat yang memberikan otonomi kepada siswa untuk melakukan perbuatan moral yang mendorong mereka untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan sosial dalam pergaulan bersama.

Prosedur pelaksanaan *Value Clarification Technique* (VCT) mencakup tahapan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, guru menyusun perangkat pembelajaran, menyiapkan media dan bahan ajar, serta mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Tahap pelaksanaan, mencakup penerapan langkah-langkah pembelajaran VCT sesuai dengan sintaknya (kebebasan memilih, menghargai dan berbuat), dimana siswa diajak untuk mengidentifikasi, menganalisis serta mengklarifikasi nilai-nilai pada aktivitas pembelajaran. Tahap refleksi adalah fase dimana guru beserta siswa bersama-sama mengevaluasi proses pembelajaran, mengidentifikasi keberhasilan serta menyusun perbaikan untuk pembelajaran berikutnya.

Nilai serta karakter integritas dan antikorupsi dapat diintegrasikan melalui beberapa pendekatan. *Pertama*, analisis gambar atau cerita/berita yang memuat dilema moral atau peristiwa terkait nilai-nilai antikorupsi. Melalui diskusi kelompok atau individu, siswa diminta untuk menganalisis isi cerita, mengidentifikasi nilai positif yang terkandung di dalamnya, serta mengevaluasi dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Contohnya adalah gambar atau cerita yang menggambarkan seorang tokoh yang memilih untuk berkata jujur, meskipun berisiko. Hal ini akan menguatkan nilai kejujuran dan keberanian dalam menghadapi konsekuensi moral.

Kedua, adalah daftar baik-buruk dan skala sikap. Opsi ini meminta siswa untuk membuat daftar perilaku baik-buruk yang relevan dengan nilai-nilai integritas. Aktivitas ini nantinya tidak hanya mengasah kemampuan berpikir kritis, melainkan melatih siswa untuk mengevaluasi dan membuat keputusan berdasarkan nilai moral yang sesuai dengan prinsip keadilan, tanggung jawab

Agung Nugraha Putra, Rahmat Rahmat, Iim Siti Masyitoh, Susan Fitriasari,. *Pendidikan Berbasis Nilai untuk Penguatan Integritas dan Antikorupsi Siswa*

dan kedisiplinan. *Ketiga*, refleksi dan klarifikasi nilai melalui diskusi. Pada pilihan ini, guru memberikan skenario pembelajaran tertentu yang menggambarkan perlunya penanaman nilai-nilai kerja keras dan kesederhanaan, serta meminta siswa untuk merefleksikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari serta kaitannya dalam mencegah perilaku korupsi.

Nilai integritas yang terdiri dari kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kemandirian, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, kepedulian, dan keadilan kemudian dapat diintegrasikan secara holistik dalam pembelajaran berbasis nilai (*value-based learning*). VBL memberikan otonomi bagi siswa untuk dapat menginternalisasikan nilai-nilai tersebut yang akan memberikan landasan serta pijakan bagi dirinya untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Dengan kata lain, nilai tidak hanya dipahami sebagai konsep yang abstrak, tetapi juga berusaha untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran berbasis nilai, mampu memberikan pengalaman serta pemahaman yang bermakna, mendorong siswa untuk mengevaluasi serta mengimplementasikan nilai-nilai yang mereka yakini. Analisis kasus atau berita tentang korupsi akan menjadikan siswa memahami dampak dari tindakan korupsi terhadap seluruh sendi kehidupan dalam masyarakat. Diskusi ini, akan memperkuat nilai kejujuran sebagai lawan dari korupsi serta keberanian untuk menolak tekanan yang mengarah kepada perilaku yang tidak etis.

Pendidikan berbasis nilai juga, diharapkan mampu mendorong siswa untuk memiliki nilai tanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Kedisiplinan dalam menjalankan tugas, kerja keras untuk mencapai tujuan tanpa jalan pintas, serta kesederhanaan dalam pola hidup merupakan modal penting untuk menjauhkan diri dari godaan untuk melakukan perilaku korup. Dengan demikian, akan menciptakan sosok atau pribadi yang adil, yang dapat menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang. Pendidikan dan pembelajaran yang berbasis pada penanaman nilai, berusaha untuk membentuk peserta didik yang bermoral dan berintegritas penuh untuk melawan korupsi. Dengan model pembelajaran ini, generasi muda diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami nilai-nilai integritas, tetapi juga berkomitmen untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata, sehingga menciptakan kehidupan yang bebas dari korupsi.

KESIMPULAN

Penguatan pendidikan karakter berbasis nilai, khususnya yang menekankan integritas dan antikorupsi, menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kemandirian, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, kepedulian, serta keadilan. Penanaman karakter integritas dapat dilakukan melalui model pembelajaran inovatif, seperti Value Clarification Technique (VCT), yang diaplikasikan dalam bentuk analisis gambar, cerita moral, penilaian daftar nilai baik dan buruk, serta penggunaan skala sikap. Pendidikan berbasis nilai ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam mencegah munculnya potensi perilaku koruptif di masa depan. Dengan menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini, peserta didik akan terbiasa berpikir kritis dan

Agung Nugraha Putra, Rahmat Rahmat, Iim Siti Masyitoh, Susan Fitriyari,. *Pendidikan Berbasis Nilai untuk Penguatan Integritas dan Antikorupsi Siswa*

memiliki pertimbangan moral yang kuat, yang pada akhirnya membentuk generasi berkarakter, beretika, dan berkomitmen untuk menolak segala bentuk korupsi.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni hanya berfokus pada kajian literatur tanpa pengujian empiris di lingkungan sekolah atau kelas. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi eksperimen atau tindakan kelas guna mengukur efektivitas penerapan metode VCT atau model berbasis nilai lainnya dalam pembelajaran antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, perlu juga eksplorasi terhadap faktor eksternal, seperti lingkungan keluarga dan media digital, yang turut mempengaruhi penguatan nilai integritas pada siswa.

REFERENSI

- Antari, L. P. S. A., & Liska, L. de. (2020). Implementas Nilai-Nilai Pancasila dalam Penguatan Karakter Bangsa. *Jurnal Widyadari*, 21(2), halaman 676-687. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4049444>
- Fakhruddin, A. U. (2018). Penguatan Pembelajaran Melalui Value Based Education. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(1), 37–49. <https://doi.org/10.14421/jpai.2017.141-03>
- Fauziyah, F. (2015). Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Al-Qur'an : Kejujuran, Tanggung Jawab dan Kesederhanaan. *Pendidikan Agama Islam*, 58, 1–16.
- Gurukul. (2024). Importance of Value Based Education. In *MIT Vishwashanti Gurukul* (hal. 1–4). <https://www.mitgurukul.com/Importance-of-Value-Based-Education.php#:~:text=Value-based education aims at,citizenship development%2C and spiritual development>.
- Hawkes, N. (2022). *What is Values-based Education?* <https://www.neilhawkes.org/what-is-values-based-education>
- KBBI. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Karakter*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/karakter>
- Kobandaha, F. (2019). Pendidikan Karakter Melalui Pendekatan Habitiasi. *Journal Irfani*, 13(1), 131–138.
- Komalasari, K. (2017). *Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi*. PT Refika Aditama.
- Komalasari, K., & Saripudin, D. (2015). Integration of anti-corruption education in school's activities. *American Journal of Applied Sciences*, 12(6), 445–451. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2015.445.451>
- Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., & Hill, W. H. (1956). *Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals. Handbook 1: affective domain*. Longman.
- Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa FIS UNNES Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. *REFLEKSI EDUKATIKA: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1), 40–45.
- Lickona, T. (1992). *Educational for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam.
- Lickona, T. (2022). *Character Matters (Persoalan Karakter): Bagaimana membantu anak mengembangkan*

- Agung Nugraha Putra, Rahmat Rahmat, Iim Siti Masyitoh, Susan Fitriasari,. *Pendidikan Berbasis Nilai untuk Penguatan Integritas dan Antikorupsi Siswa*
penilaian yang baik, integritas dan kebajikan penting lainnya. Bumi Aksara.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Murdiono, M. (2016). Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PKn untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/socia.v13i1.9910>
- Nasional, K. P. (2010). *Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Nurjunaedah, N. (2014). Pendidikan Berbasis Nilai (Analisis Teori dan Implementasi). *Jurnal Tarbiyah*, 21(2), 243–260.
- Sanusi, H. A. (2009). Relasi antara korupsi dan kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 83-104.
- Shobirin, M. (2014). Model Penanaman Nilai Antikorupsi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 1(2), 107–117.
- Suradi. (2006). *Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*. Gava Media.
- Tuhuteru, L., Supit, D., Mulyadi, Abdurahman, A., & Assabana, M. S. (2023). Urgensi Penguatan Nilai Integritas dalam Pendidikan Karakter Siswa. *Journal on Education*, 5(3), 9768–9775. <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/1795>
- Yamin, M. (2016). *Pendidikan Antikorupsi*. PT Remaja Rosdakarya.